

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2010).

Pengembangan wilayah adalah seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada untuk mendapatkan kondisi-kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di daerah tersebut dan dalam skala nasional (Mulyanto, 2008).

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah yang dilakukan oleh setiap pemerintah daerah hingga saat ini, tidak terlepas dari perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang telah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri untuk lebih memajukan dan melakukan pembangunan di daerah masing-masing. Undang-undang ini sekaligus menjadi reformasi dalam tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta menjadi cikal bakal lahirnya otonomi daerah di Indonesia.

UU No. 32 Tahun 2004, menyebutkan bahwa pembangunan harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, karena setiap daerah memiliki karakter baik itu sosial, budaya, bahkan geografis yang berbeda sehingga perlu kebijakan yang berbeda pula. Maka, kebijakan pembangunan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi yang ada didaerahnya agar mampu mencapai pembangunan yang optimal.

Tidak mudah untuk mengetahui potensi ekonomi daerah, sebab setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda baik dari sisi potensi kandungan sumber daya alam, kondisi geografis maupun potensi khas daerah lainnya. Oleh karena itu penyusunan kebijaksanaan pembangunan daerah, terutama bagi daerah baru, tidak dapat secara serta merta mengadopsi kebijaksanaan nasional, Provinsi maupun daerah induknya atau daerah lain yang dianggap berhasil. Untuk membangun suatu daerah, kebijakan yang diambil harus sesuai dengan masalah, kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan (Arsyad, 1999).

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu wilayah yang terdapat di Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten ini posisinya cukup strategis yaitu terletak pada jalur yang menghubungkan 3 provinsi yaitu Provinsi Riau, Provinsi Jambi, dan Sumatra Barat. Jalur lintas Provinsi yang di miliki Kabupaten Sijunjung menjadi sebuah potensi yang besar bagi perekonomian daerah (BPS Kabupaten Sijunjung, 2015).

Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Sijunjung telah berlangsung selama 67 tahun sejak terbentuk pada tanggal 18 Februari 1949 menurut Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Barat Nomor SK/9/GN/IST.

Selama kurun waktu itu telah terjadi beberapa kali perubahan wilayah administratif dan pembangunan. Pada dekade awal (1949-1960) penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menghadapi situasi yang cukup berat sehingga proses pembangunan tidak dapat terlaksana dengan baik (RPJP Kabupaten Sijunjung, 2005-2025).

Perubahan wilayah administratif dan pembangunan berlangsung pada tahun 1990. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1990 tanggal 1 September 1990 tentang Perubahan Batas dan Luas Kotamadya Daerah tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Solok dan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menyebabkan sebagian wilayah Sijunjung dimasukkan ke Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto. Perubahan ini ditujukan untuk memperlancar proses pembangunan daerah (RPJP Kabupaten Sijunjung, 2005-2025).

Era otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sijunjung mengalami perubahan yang besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, pembangunan Kabupaten Sijunjung memasuki era baru. Wilayah administratif dan pembangunan Kabupaten Sijunjung secara resmi tidak lagi mencakup Kabupaten Dharmasraya. Luas daerah Kabupaten Sijunjung setelah pembentukan Kabupaten Dharmasraya menjadi 3.130,80 Km² dengan jumlah penduduk 192.991 jiwa pada tahun 2005 (RPJP Kabupaten Sijunjung, 2005-2025).

Sebelum tahun 2003 seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Sijunjung menyatu dengan Kabupaten Dharmasraya. Wilayah administratif Kabupaten Sijunjung pada masa itu yang demikian luas telah menyebabkan sebagian dari rencana-rencana pembangunan daerah menemui berbagai kesulitan dalam pelaksanaannya terutama terkait dengan percepatan pemerataan pembangunan yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembentukan Kabupaten Dharmasraya yang telah terpisah dari Kabupaten Sijunjung merupakan langkah konkrit untuk mempermudah penyusunan rencana pembangunan di kedua wilayah, sehingga memungkinkan terwujudnya percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat secara luas (RPJP Kabupaten Sijunjung, 2005-2025).

Pembentukan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan UU No 38 tahun 2003 telah membawa pengaruh yang cukup signifikan pada penguasaan potensi sumber daya alam bagi Kabupaten Sijunjung. Sumber daya alam merupakan modal utama penopang pembangunan ekonomi dan sistem kehidupan Sijunjung. Hingga tahun 2005, peran sumber daya alam dalam pembentukan PDRB Sijunjung mencapai 40 persen. Pemanfaatan sumber daya alam terutama berkaitan dengan sektor pertanian dan pertambangan yang merupakan sumber penghidupan utama sebagian besar masyarakat. (RPJP Kabupaten Sijunjung, 2005-2025).

Daerah memiliki potensi ekonomi yang sangat besar yaitu meliputi potensi kekayaan sumber daya alam yang beranekaragam dan melimpah dan potensi sumber daya manusia. Mulai dari potensi pertaniannya, peternakan dan perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan sumber daya lainnya (BPS Kabupaten Sijunjung, 2015). meskipun demikian, fenomena yang terjadi hingga saat ini

adalah potensi yang dimiliki tersebut masih belum mampu dikelola dengan optimal, masih banyak permasalahan, hambatan dan tantangan pembangunan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah, seperti kendala belum optimalnya pengelolaan terhadap potensi pertanian, kehutanan, peternakan, pertambangan, konstruksi, industri pengolahan, sarana-prasarana perdagangan, transportasi, dan pelayanan jasa-jasa. Selain itu, setiap daerah belum menunjukkan kecenderungan adanya pengembangan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki. (RTRW, 2011-2013).

Disisi lain fenomena masalah pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah juga belum mampu di atasi dengan baik oleh pemerintah daerah yang mengakibatkan terjadi ketimpangan antar daerah. meskipun Kabupaten Sijunjung mulai gencar dalam membangun sarana dan prasarana, namun kondisi sarana dan prasarana saat ini masih menunjukkan keterbatasan baik dari kuantitas ataupun dari kualitas. Disamping itu, aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana untuk menggerakkan perekonomian masih rendah dan terbatas sehingga sarana dan prasarana yang ada saat ini belum berfungsi secara optimal sebagai elemen pendorong pembangunan ekonomi sektor riil Kabupaten Sijunjung (RTRW, 2011-2013).

Mengingat hal ini perlu di lakukan suatu pengkajian yang lebih dalam untuk keperluan perencanaan pembangunan dan bahan pertimbangan kebijakan terhadap pengelolaan potensi ekonomi yang dimiliki. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Potensi Ekonomi Dalam Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sijunjung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas adapun rumusan masalah yang akan di analisis diantaranya:

1. Sektor-sektor ekonomi apakah yang potensial di Kabupaten Sijunjung, sehingga dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan wilayah?
2. Bagaimanakah tingkat interaksi dan tingkat pemerataan pembangunan di Kabupaten Sijunjung serta kaitannya dalam penentuan lokasi strategis yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan wilayah?
3. Komoditi ekonomi apakah yang merupakan komoditi unggulan di masing-masing Kecamatan, sehingga dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan wilayah?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara spesifik tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis sektor-sektor ekonomi yang potensial di Kabupaten Sijunjung yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan wilayah.
2. Menganalisis pengaruh tingkat interaksi dengan tingkat pemerataan pembangunan di Kabupaten Sijunjung serta kaitannya dalam penentuan lokasi strategis yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan wilayah.

3. Menganalisis komoditi ekonomi unggulan di masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan wilayah.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah dan mengapa memilih Kabupaten Sijunjung sebagai studi kasus dari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan teori-teori dan penelitian terdahulu yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. Dari landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut maka di dapat kerangka pemikiran konseptual.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, ruang lingkup penelitian dan metode penelitian.

BAB IV: GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang kondisi umum daerah dan perkembangan ekonomi wilayah Kabupaten Sijunjung dalam priode 2006-2015 serta perkembangan sektor-sektor ekonomi.

BAB V: TEMUAN EMPIRIS DAN IMPIKASI KEBIJAKAN

Dalam bab ini memuat hasil dan pembahasan dari analisa data yang telah diteliti serta merumuskan kebijakan apa yang perlu dan bisa diambil dalam penelitian ini.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi saran untuk berbagai pihak.

